

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA MELALUI POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

ANGGITO TANUWIJAYA

30.0291

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi

Program Studi Kebijakan Publik

Email: [anggitotanuwijaya@gmail.com](mailto:anggitotanuwijaya@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhadam Labolo, M.Si.

## ABSTRACT

**Problems/Background (GAP):** Communities have a position as the subject of empowerment activities carried out by the government in order to achieve economic independence. Therefore, it is necessary to increase activities in community empowerment, especially in realizing a community that is able to be independent and develop in improving the quality of its environment. This is the goal of implementing appropriate technology policies in Jambi City. **Purpose:** This study aims to find out how the implementation of appropriate technology implementation policies in Jambi City, Jambi Province, and to determine the supporting and inhibiting factors in implementing appropriate technology implementation policies in Jambi City, Jambi Province. **Method:** The sampling technique used in this study used purposive sampling. This type of research is qualitative with data collection using observation and interview methods. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the application of appropriate technology policies in Jambi City has been going quite well, but there are several obstacles in its implementation. There are several supporting factors in the implementation of appropriate technology application policies in Jambi City, namely the support from the government and the community who are members of the posyantek group to continue implementing this policy. However, there are also inhibiting factors, namely the budget allocation for the implementation of the appropriate technology policy which is still lacking and insufficient. **Conclusion:** The implementation of the Policy for Applying Appropriate Technology through the Appropriate Technology Service Post (Posyantek) in Jambi City, Jambi Province has been implemented well, but still needs some improvement in the dimensions of communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure according to Edward III Theory.

**Keywords:** Implementation, Technology, Society

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masyarakat memiliki posisi sebagai subjek dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghadirkan kemandirian ekonomi. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat terkhususnya mewujudkan masyarakat yang mampu mandiri dan berkembang dalam peningkatan mutu di lingkungannya. Hal inilah yang menjadi tujuan dari diterapkannya kebijakan teknologi tepat guna di Kota Jambi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penerapan teknologi tepat guna di Kota Jambi Provinsi Jambi serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penerapan teknologi tepat guna di Kota Jambi Provinsi Jambi. **Metode:** Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini ialah penerapan kebijakan teknologi tepat guna di Kota Jambi sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penerapan teknologi tepat guna di Kota Jambi yaitu adanya dukungan dari pemerintah serta masyarakat yang tergabung dalam kelompok posyantek untuk terus menjalankan kebijakan ini. Namun terdapat juga faktor penghambat yaitu pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kebijakan teknologi tepat guna tersebut yang masih kurang dan belum mencukupi. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Penerapan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kota Jambi Provinsi Jambi telah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu beberapa peningkatan pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai dengan Teori Edward III.

**Kata Kunci:** Implementasi, Teknologi, Masyarakat

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat memiliki posisi sebagai subjek dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghadirkan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu masyarakat harus diberikan berbagai alternatif langkah atau tindakan pemberdayaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing masyarakat. Salah satu poin yang ditekankan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dapat terwujudnya masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat terkhususnya pelaksanaan kegiatan yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya guna mewujudkan masyarakat yang mampu mandiri dan berkembang dalam peningkatan mutu di lingkungannya.

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2021, Kota Jambi memiliki jumlah penduduk sebanyak 591.134 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 205,38 km<sup>2</sup> dan terletak di jalur lintas sumatera menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perekonomian di Provinsi Jambi. Adapun pendapatan perkapita

masyarakat di Kota Jambi adalah sebesar 49,18 juta Rupiah pada tahun 2020. Meskipun begitu, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah di Kota Jambi. Hal ini dapat dilihat pada data yang dirilis pada tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi yang mendata jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk miskin di Kota Jambi sebanyak 54,23 ribu jiwa. Hal ini menempatkan Kota Jambi menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jambi. Karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat Kota Jambi agar dapat memiliki kehidupan yang layak.

Dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah kota Jambi untuk mengeluarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat kota Jambi guna membantu meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat Kelurahan melalui pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta memberikan dampak positif kepada ekonomi masyarakat.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada tiga permasalahan utama dalam pelaksanaan Kebijakan Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Jambi, Provinsi Jambi yaitu: 1) Kurangnya pegawai atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan latar belakang di bidang teknik dalam menerapkan kebijakan ini. 2) Kurangnya alokasi dana yang diberikan dalam menjalankan kebijakan ini sehingga penerapannya dirasa kurang maksimal. 3) Tidak adanya insentif yang diberikan dalam penerapan kebijakan ini sehingga penerapannya menjadi kurang maksimal.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengembangan teknologi tepat guna maupun penerapannya. Penelitian pertama dilakukan oleh Binta Gunawan (2014) dengan judul "Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna" dengan studi kasus pada dua mitra binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemberdayaan melalui penerapan TTG pada dua UKM sangat efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diterapkan dalam proses produksi dua UKM. Dengan penerapan TTG membuat kualitas produk menjadi lebih bagus serta meningkatkan keunggulan daya saing, memperluas Pemasaran, meningkatkan kuantitas produksi UKM, dan meningkatkan omset UKM. Adapun dampak penerapan TTG kepada masyarakat yaitu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan pengurus dan karyawan UKM yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Gede Eka Dharma Antara (2015). Penelitian ini berjudul "Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat

Guna dan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Memajukan Industri Kreatif di Bali”. Hasil penelitian ini yaitu sebagai salah satu sektor industri kreatif di Bali yang menjanjikan dan hasilnya sudah banyak diekspor ke luar negeri sektor kerajinan anyaman bambu memiliki potensi yang besar. Peningkatan teknologi informasi dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna di masyarakat perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan dan dilakukan sehingga benar-benar nantinya agar teknologi informasi tersebut bisa bermanfaat dengan maksimal, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan teknologi informasi yaitu perespektif teknis dan perspektif manajerial. Peningkatan program berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan adalah melalui kegiatan-kegiatan pembentukan lembaga kemasyarakatan, kelompok TTG masyarakat yakni melalui Posyantek di tingkat kecamatan dan Wartek di tingkat desa/kelurahan.

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nekky Rahmiyati, Sri Andayani, dan Hotman Panjaitan (2015). Penelitian ini berjudul “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto”. Hasil dari penelitian ini (1) Memberdayakan masyarakat adalah memungkinkan dan memandirikan masyarakat hingga muncul perubahan yang efektif dan efisien; (2) Dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan perekonomian sangat diperlukan dukungan teknologi tepat guna yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat; (3) Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna cenderung mencari jalan "termudah" dalam menentukan sasaran atau penerima/calon adaptor teknologi tepat guna; (4) Terjadi masalah ke "Tepat guna" teknologi karena ketidak sesuaiannya antara teknologi tepat guna yang di implementasikan dengan kondisi lokasi; (5) Keberlanjutan usaha agar UMKM mandiri, perlu pendampingan teknis dan non teknis; (6) Peran Pemerintah adalah hal yang mutlak harus ada dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna.

Penelitian sebelumnya yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Riza Fauziyah (2020). Penelitian ini berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat”. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menjembatani alih teknologi tepat guna untuk proses pemberdayaan masyarakat, Posyantek hadir untuk memberikan informasi serta pelatihan juga pengembangan TTG seperti pengolahan limbah sampah rumah tangga dengan alat tepsorlimbah Koran dan *Styrofoam*, pengolahan kerajinan kain perca, pembuatan oleh-oleh khas Jakarta, pembuatan bunga akrilik dan pembuatan peyek dengan mesin pencacah kacang dan lain sebagainya sehingga menjadikan masyarakat mandiri dengan TTG serta inovasi-inovasi yang telah diberikan oleh Posyantek untuk pengembangan ekonomi.

Penelitian sebelumnya yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Soeparno Djiwo dan Eko Yohanes Setyawan (2016). Penelitian ini berjudul “Penggunaan Mesin Teknologi Tepat Guna Sabut Kelapa di UKM Sumber Rejeki Kabupaten Kediri”. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan mesin teknologi tepat guna dapat meminimalisir waktu proses produksi yang sebelumnya membutuhkan waktu dua hari sekarang menjadi satu hari. Dan adanya peningkatan kualitas produk sabut kelapa yang lebih halus serta kuantitas produk meningkat 50%

dalam satu kali proses. Sehingga dengan adanya mesin teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas sabut kelapa. Dalam proses menggunakan mesin dipengaruhi oleh RPM mesin. Untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas produk yang maksimal pada RPM 400 dengan hasil sabut kelapa 82%.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana locus dan hasil penelitian yang dilakukan yakni locus Kota Jambi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan teknologi tepat guna di Kota Jambi pemerintah dalam hal ini melalui DPMPPA bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan berupa pendanaan maupun dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga agar masyarakat melalui Posyantek dapat mengembangkan dan menerapkan secara luas teknologi tepat guna disekitarnya. Sedangkan pada lokasi penelitian Binta Gunawan di Kabupaten Grobogan, hasil penelitian yang dilakukan Binta Gunawan menyimpulkan bahwa dengan penerapan TTG membuat kualitas produk menjadi lebih baik serta meningkatkan kuantitas produksi dan omset UKM. Pada penelitian ini Binta Gunawan berfokus kepada pengaruh teknologi tepat guna terhadap UKM yang ada di Kabupaten Grobogan. Untuk lokasi penelitian Gede Eka Dharma Antara di Provinsi Bali, hasil penelitian Gede Eka Dharma Antara menyimpulkan bahwa cara untuk memajukan industri kreatif yang ada di Bali yakni dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai mediator dan fasilitator untuk memudahkan dan menjembatani antara produsen, pelaku usaha dan konsumen. Serta peningkatan inovasi teknologi tepat guna melalui program pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Pada penelitian ini fokus dari teknologi tepat guna yang digunakan yaitu pada teknologi informasi untuk membantu industri kreatif yang ada di Bali. Kemudian pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nekky Rahmiyati, Sri Andayani, dan Hotman Panjaitan yang dilakukan di Kota Mojokerto menyimpulkan bahwa 1). Dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan perekonomian sangat diperlukan dukungan teknologi tepat guna yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat; 2). Terjadi masalah ke "Tepat gunaan" teknologi karena ketidak sesuaiannya antara teknologi tepat guna yang di implementasikan dengan kondisi lokasi; dan 3). Peran Pemerintah atau dukungan stake holder adalah hal yang mutlak harus ada dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Riza Fauziyah di Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat yaitu pada proses pemberdayaan Program Posyantek yang dilaksanakan oleh posyantek Kecamatan Grogol Petamburan di beberapa kelurahan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan informasi, tahapan kursus/pelatihan, dan tahapan pendampingan. Dan pada hasil penelitian oleh Soeparno Djiwo dan Eko Yohanes Setyawan menyatakan bahwa menggunakan mesin teknologi tepat guna dapat meminimalisir waktu proses produksi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses produksi sabut kelapa.

#### **1.5 Tujuan**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penerapan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kota Jambi Provinsi Jambi.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis berasumsi bahwa penulis akan menemukan sumber informasi yang sebenarnya terjadi secara luas dan mendalam, sehingga penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari penelitian dan memberikan gambaran secara sistematis melalui analisis induktif, yang memungkinkan pengamatan penulis muncul dari keadaan umum dan keadaan awal penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara semi terstruktur terhadap delapan orang informan yang terdiri dari Kepala DPMPPA Kota Jambi, Kepala Bidang PLKLAMHA Kota Jambi, Camat Kecamatan Jelutung, Lurah Kelurahan Jelutung, Ketua Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kelurahan Jelutung, dan Tiga orang masyarakat di Kelurahan Jelutung. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Edward III, yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari 4 dimensi yakni komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Dan untuk menganalisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penerapan teknologi tepat guna melalui pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek) di Kota Jambi Provinsi Jambi menggunakan teori dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari empat dimensi, yakni komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1 Implementasi Kebijakan Penerapan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kota Jambi Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan penulis ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam memberdayakan masyarakat melalui teknologi tepat guna antara lain:

#### A. Komunikasi

Sesuai hasil penelitian, kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi sudah berjalan dengan cukup baik. Tetapi masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Secara teknis kendala yang terjadi yaitu kurangnya jumlah tenaga ahli untuk mensosialisasikan dan memberikan pelatihan tentang teknologi tepat guna kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi masih

menggunakan cara yang konvensional seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang teknologi tepat guna. Cara konvensional ini memiliki beberapa kelemahan antara lain membutuhkan waktu, tenaga dan anggaran yang lebih banyak. Alasan mengapa DPMPPA masih menggunakan cara konvensional dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengikuti perkembangan teknologi. Meskipun menggunakan cara penyampaian komunikasi yang masih tergolong konvensional informasi terkait teknologi tepat guna ini dapat diterima dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil observasi penelitian yang penulis lakukan dimana masyarakat terlihat antusias dan aktif selama proses sosialisasi yang menunjukkan bahwa proses sosialisasi berjalan dengan baik.

## **B. Sumber Daya**

Sumber daya yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi sumber daya yang berkaitan dengan manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas. Sumber daya juga faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan penerapan teknologi tepat guna melalui pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek) di Kota Jambi Provinsi Jambi. Meskipun suatu kebijakan bagus secara konseptual, akan tetapi jika tidak memiliki sumber daya yang memadai maka kebijakan tidak bisa diimplementasikan secara optimal. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, Kota Jambi memiliki potensi dalam penerapan teknologi tepat guna. Dikarenakan posisi Kota Jambi sendiri sebagai Ibukota Provinsi Jambi. Sehingga pengaruh pembangunan dan informasi serta teknologi sendiri lebih cepat diterima oleh Kota Jambi.

Dalam penerapan kebijakan teknologi tepat guna ini masih terdapat kendala terkait dengan sumber daya yang ada. Salah satunya yaitu kesesuaian antara pegawai pelaksana kebijakan yang ada dengan kompetensi yang mereka miliki. Dimana rata-rata pegawai pelaksana kebijakan tidak memiliki latar belakang dalam bidang teknologi. Selain itu kendala lainnya terdapat pada dana yang masih belum mencukupi untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan penerapan teknologi tepat guna. Sehingga terkait kegiatan pengembangan dan produksi teknologi tepat guna masih mengandalkan swadaya dari masyarakat. Faktor sumber daya memiliki peran penting dalam setiap program yang dijalankan untuk mengimplementasikan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh seberapa kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang menunjang lainnya.

Kaitan antara sumber-sumber dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, bahwa dengan ketercukupan sumber-sumber daya akan mengundang keterlibatan individu-individu atau kelompok kepentingan lain dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengimplementasian kebijakan. Akan tetapi, apabila sumber-sumber daya yang tersedia sangat terbatas, tidak jarang akan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dengan kata lain dinyatakan bahwa prospek manfaat dari implementasi kebijakan akan mengundang partisipasi optimal berbagai pihak dalam masyarakat, sebaliknya jika tidak menguntungkan akan mendatangkan penolakan dari berbagai pihak dalam masyarakat.

## **C. Disposisi**

Sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para

pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dari para pembuat keputusan. Maka kebijakan dapat berjalan dengan baik. Para pelaksana sangat memahami bahwa pemahaman mereka secara umum maupaun rinci tentang ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan adalah penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu ketidaktaatan mereka terhadap kebijakan akan berdampak pada kegagalan implementasi dari kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi selaku komponen penggerak dalam implementasi kebijakan memiliki sikap yang mendukung dan juga mendorong agar tercapainya program kerja yang menunjang implementasi kebijakan. Semangat dari DPMPPA Kota Jambi ini pun didukung oleh masyarakat yang ada di Kota Jambi dengan antusias. Dukungan ini diberikan oleh masyarakat karena menurut mereka dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan manfaat yaitu dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memberikan nilai tambah dalam aspek ekonomi maupun lingkungan.

#### **D. Struktur Birokrasi**

Menurut hasil wawancara dan observasi peneliti, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki SOP yang secara khusus mengatur program penunjang implementasi kebijakan. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kota Jambi. SOP merupakan salah satu program atau jenis kebijakan yang diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. SOP mempunyai dua makna, yaitu suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok dalam mencapai tujuan organisasi serta SOP merupakan tata cara atau tahapan yang diberlakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Dengan SOP pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk menjalankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam penerapan peraturan sesuai program dan kontrol.

SOP yang tidak jelas, baik itu menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara para pelaku serta tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksana maka akan dapat menimbulkan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Jika SOP jelas, maka akan semakin mudah dalam menentukan kebutuhan sumber daya. Selain itu, semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, maka semakin memudahkan para pelaku implementasi kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik itu menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, dan hasil apa yang dicapai maupun dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan. Keadaan ini akan memudahkan seseorang dalam menentukan sikap dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Sedangkan selain SOP, struktur birokrasi juga termasuk di dalamnya fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Dalam penerapan kebijakan teknologi tepat guna ini DPMPPA Kota Jambi memiliki kerjasama dengan Universitas Jambi dalam hal sebagai konsultan sekaligus pembina masyarakat dalam mengenal dan menerapkan



teknologi tepat guna. Akan tetapi hal ini bukan termasuk fragmentasi yang merupakan penyebaran tanggung jawab. Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi karena akan membatasi kemampuan para pejabat tinggi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan akibat lebih lanjut dapat menimbulkan terjadinya ketidakefisienan serta pemborosan sumber daya yang ada. Fragmentasi dapat meningkatkan kegagalan komunikasi, dimana instruksi yang dijalankan oleh para pelaksana implementasi kebijakan akan terdistorsi. Fragmentasi dapat membatasi kemampuan para pelaku implementasi kebijakan untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan. Organisasi pelaksana implementasi kebijakan yang terfragmentasi dapat menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Organisasi pelaksana yang semakin terfragmentasi akan semakin membutuhkan koordinasi yang intensif, sehingga menimbulkan peluang terjadinya distorsi komunikasi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kota Jambi Provinsi Jambi**

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis peneliti, ditemukan Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerapan teknologi tepat guna ini yaitu tingginya dukungan dan animo masyarakat yang tergabung didalam kelompok masyarakat dan posyantek yang ada. Kelompok masyarakat ini juga memberikan inovasi yang bermanfaat dalam penerapan dan pengelolaan teknologi tepat guna yang jika dipergunakan secara luas dapat membantu masyarakat dan memberikan nilai tambah dalam aspek ekonomi maupun lingkungan. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu adanya dukungan dari seluruh elemen di pemerintahan mulai dari Dinas hingga Kelurahan yang terus mendukung penerapan teknologi tepat guna ini. Sehingga kebijakan ini dapat dijalankan dan mendapat dukungan penuh dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerapan teknologi tepat guna ini yaitu terdapat pada pendanaan yang ada. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah belum cukup untuk membiayai kegiatan pengembangan teknologi tepat guna. Terkhusus untuk membiayai seluruh posyantek dalam mengembangkan teknologi tepat guna yang dimiliki. Selain itu faktor penghambat lainnya yaitu masih kurangnya jumlah individu yang dapat menjadi pionir dalam mengembangkan teknologi tepat guna. Sehingga dalam penerapan dan pengembangan posyantek selalu dilakukan oleh individu yang sama tanpa adanya pionir baru yang dapat memacu masyarakat untuk terus mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna ini.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat permasalahan yang berkaitan antara sumber-sumber dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Bahwa dengan ketercukupan sumber-sumber daya akan mengundang keterlibatan individu-individu atau kelompok kepentingan lain dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengimplementasian kebijakan. Akan tetapi, apabila sumber-sumber daya yang tersedia sangat terbatas, tidak jarang akan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dengan kata lain dinyatakan bahwa prospek manfaat dari implementasi kebijakan akan mengundang partisipasi optimal berbagai pihak dalam masyarakat,

sebaliknya jika tidak menguntungkan akan mendatangkan penolakan dari berbagai pihak dalam masyarakat. Dukungan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar karena menurut mereka, dengan adanya kebijakan teknologi tepat guna ini dapat memberikan manfaat yaitu dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memberikan nilai tambah dalam aspek ekonomi maupun lingkungan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Penerapan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kota Jambi Provinsi Jambi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Penerapan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kota Jambi Provinsi Jambi telah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu beberapa peningkatan pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan teknologi tepat guna yang dilakukan pemerintah yaitu adanya dukungan dari pemerintah serta masyarakat yang tergabung dalam kelompok posyantek untuk terus menjalankan kebijakan ini serta pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kebijakan teknologi tepat guna tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penerapan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kota Jambi Provinsi Jambi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi beserta jajarannya dan Posyantek Ojo Lali Kelurahan Jelutung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### Skripsi/Jurnal Ilmiah

Antara, G. E. D. (2015). Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memajukan Industri Kreatif di Bali. *Jurnal PASTI Volume IX No 3*.

- Djiwo, S., & Setyawan, E. Y. (2016). Mesin teknologi tepat guna sabut kelapa di ukm sumber rejeki kabupaten kediri. *Research Report*, 576-582.
- Fauziah, R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) di Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Gunawan, B. (2014) Proses Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna (Studi Pada Dua Mitra Binaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Karya Mandiri Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan). *Universitas Negeri Semarang*.
- Rahmiyati, N., Andayani, S., & Panjaitan, H. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Vol 2 No 2*, 48-62.

